



PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN BPK, KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP NILAI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PEMERINTAH DAERAH

Rifki Ahmad Pratama, Faisal¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Jl. Prof. Soedharto, S.H. Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aimed to analyze the effect of the audit results by Audit Board of Indonesia (BPK), the financial performance of local governments and the size of local governments on the local governments corruption perception index. The variables tested in this research are audit opinion on the financial statements of local government, the findings on the internal control system, the findings on compliance with laws and regulations, self-reliance ratio, growth ratio, the ratio of effectiveness and the size of local governments.

This study uses secondary data derived from the results of the audit report by BPK on the financial statements of local governments in 2009 fiscal year and local governments corruption perception index derived from research reports by Transparency International Indonesia in 2010. The method uses in this study on selecting the samples are purposive sampling method. The data in this study tested using classic assumption test and correlation analysis. The hypothesis in this study tested using multiple linear regression analysis.

The results showed that not all the audit results by BPK has a significant influence on the local governments corruption perception index. Findings on compliance with the legislation is the only variable of the audit results by BPK with significant influence and negatively affect the local governments corruption perception index. Based on the financial performance of local governments, the variables that have a significant influence on the local government corruption perception index only independence ratio and effectiveness ratio and which have a positive influence on the local government corruption perception index. The size of local governments have a significant negative effect on the local government corruption perception index.

Keywords: audit results by Audit Board of Indonesia (BPK), the financial performance of local governments, the size of local governments, the local governments corruption perception index.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan suatu fenomena yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia. Banyak pihak yang menganggap bahwa korupsi merupakan suatu budaya turun temurun di Indonesia. Anggapan tersebut berdasarkan banyaknya kasus korupsi yang terjadi Indonesia dari tahun ke tahun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pada tahun 2012 KPK menangani 49 perkara korupsi dan pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah perkara sebesar 70 perkara (kpk.go.id, 2014).

Korupsi di Indonesia terjadi di banyak sektor antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta instansi-instansi lainnya. Kasus penyelewengan atau korupsi yang tadinya terpusat di pemerintahan pusat menjadi berkembang di tingkat pemerintahan daerah (Mardiasmo, 2005). Bahkan hasil penelitian

¹ Corresponding author

Indonesia Corruption Watch (ICW) juga membuktikan bahwa keuangan di daerah merupakan sumber potensi korupsi terbesar yang menyebabkan kerugian negara (Yuda, 2010).

Pemerintah telah mengatur mengenai pengawasan pengelolaan keuangan negara di Indonesia dengan membentuk beberapa instansi dengan tujuan agar penyelewengan terhadap pengelolaan keuangan negara serta korupsi di Indonesia dapat dihilangkan. Institusi pemeriksa yang dibentuk oleh pemerintah antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta inspektorat jenderal masing-masing instansi pemerintah, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melaporkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan di instansinya. Laporan keuangan tersebut diperiksa terlebih dahulu kewajarannya oleh BPK sebelum dilaporkan kepada DPR dan DPRD.

Selain adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, instansi pemerintah juga dituntut agar mempunyai kinerja keuangan yang baik dengan tujuan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Semakin baik kinerja keuangan suatu instansi maka masyarakat luas beranggapan bahwa semakin kecil pula tingkat korupsi yang terjadi di instansi tersebut. Faktor lain yang dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat luas dalam menentukan tingkat korupsi di suatu pemerintah daerah yaitu ukuran pemerintah daerah itu sendiri. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa dengan semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah maka peluang untuk terjadinya korupsi di pemerintah daerah tersebut semakin besar seiring dengan semakin banyaknya anggaran yang berpotensi disalahgunakan oleh oknum-oknum di pemerintah daerah tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadi.

Transparency International Indonesia telah melakukan survey untuk mengukur persepsi korupsi terhadap pemerintah daerah di Indonesia dengan hasil berupa nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Dalam melakukan survey, *Transparency International Indonesia* mengambil responden dari pelaku usaha yang tersebar dari beberapa kota di Indonesia. Skala penilaian IPK yaitu 1-10 dimana semakin besar nilai IPK suatu daerah maka persepsi korupsi terhadap pemerintah daerah tersebut semakin kecil.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh hasil pemeriksaan BPK (opini, temuan atas sistem pengendalian internal dan temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan), kinerja keuangan (rasio kemandirian, rasio pertumbuhan dan rasio efektifitas) dan ukuran pemerintah daerah terhadap nilai indeks persepsi korupsi pemerintah daerah di Indonesia.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori yang menjadi dasar penelitian ini adalah teori keagenan (*agency theory*). Definisi teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) yaitu hubungan antara agen (manajemen suatu usaha) dan prinsipal (pemilik usaha). Dalam hubungan keagenan, terdapat kontrak antara agen dengan prinsipal dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk membuat suatu keputusan yang tepat. Inti dari teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan (Scott, 1997).

Pada dasarnya organisasi sektor publik merupakan bentuk dari hubungan keagenan dimana pemerintah merupakan agen sedangkan masyarakat merupakan prinsipal. Hal ini terlihat dari tugas dari pemerintah yang diberikan mandat oleh masyarakat untuk membuat keputusan yang tepat bagi negara. Masyarakat memilih pemerintah yang mereka percaya untuk memegang tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai suatu kepentingan salah satunya yaitu pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Pengelolaan keuangan negara terdiri atas penyusunan anggaran, penyerapan anggaran serta laporan pertanggungjawaban.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan terdapat dua permasalahan dalam hubungan keagenan yaitu:

- a. *Moral hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.
- b. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Arifah (2012) menjelaskan salah satu contoh permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara yaitu dalam proses penyusunan anggaran. Masalah-masalah dalam proses penyusunan anggaran akan menimbulkan permasalahan seperti yang telah dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976) yaitu *moral hazard*. Dalam hal ini, masyarakat sebagai prinsipal tidak dapat mempercayai kinerja dari pemerintah sebagai agen karena adanya masalah-masalah tersebut sehingga menyebabkan tumbuhnya persepsi korupsi di mata masyarakat.

Pengaruh Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Nilai IPK Pemerintah Daerah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Diyah Masitoh, Ratna Wardhani dan Dyah Setyaningrum dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010” (2012), terdapat kesimpulan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi, dimana semakin baik opini audit yang diperoleh maka pemerintah daerah memiliki persepsi korupsi yang lebih rendah. Hasil pengujian tambahan menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memperoleh pernyataan tidak memberikan pendapat dari auditor memiliki persepsi korupsi yang secara signifikan lebih tinggi dibanding pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar.

Hasil lain menunjukkan bahwa temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap persepsi korupsi. Namun, pengujian tambahan menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi korupsi. Selain itu, temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi. Hasil pengujian tambahan membuktikan bahwa ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah dan potensi kerugian daerah memiliki pengaruh yang positif secara signifikan terhadap persepsi tingkat korupsi di pemerintahan daerah. Semakin rendah persepsi korupsi suatu pemerintah daerah maka nilai indeks persepsi korupsi pemerintah daerah tersebut semakin tinggi. Peneliti beranggapan bahwa tidak akan ada perbedaan hasil dengan penelitian sebelumnya.

H1 : Opini BPK mempunyai pengaruh positif terhadap nilai IPK pemerintah daerah.

H2 : Temuan atas sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh negatif terhadap nilai IPK pemerintah daerah.

H3 : Temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mempunyai pengaruh negatif terhadap nilai IPK pemerintah daerah.

Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Nilai IPK Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu bentuk penilaian terhadap sejauh mana suatu pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya sehingga menghasilkan suatu kondisi yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel. Menurut Mardiasmo (2009), untuk menciptakan kondisi yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah maka diperlukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dengan kata lain kinerja keuangan suatu pemerintah daerah dapat dilihat dengan menghitung rasio-rasio keuangan. Semakin besar nilai rasio-rasio keuangan tersebut maka kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut semakin baik. Peneliti beranggapan bahwa masyarakat luas mempunyai pola pikir semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah maka semakin kecil terjadinya korupsi di pemerintah daerah tersebut dengan kata lain semakin besar nilai rasio maka

tingkat korupsi pada pemerintah daerah tersebut semakin kecil. Semakin kecil tingkat korupsi maka semakin besar nilai IPK pemerintah daerah tersebut.

Rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio kemandirian yang mengukur tingkat kemandirian pemerintah daerah, rasio pertumbuhan yang mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah dari satu periode ke periode berikutnya dan rasio efektivitas yang mengukur tingkat efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

H4 : Rasio kemandirian mempunyai pengaruh positif terhadap nilai IPK pemerintah daerah.

H5 : Rasio pertumbuhan mempunyai pengaruh positif terhadap nilai IPK pemerintah daerah.

H6 : Rasio efektivitas mempunyai pengaruh positif terhadap nilai IPK pemerintah daerah.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Nilai IPK Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah dapat diukur dari jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Semakin besar jumlah aset yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah menandakan semakin besar ukuran pemerintah daerah tersebut. Peneliti beranggapan bahwa masyarakat luas mempunyai pola pikir bahwa dengan semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah maka peluang untuk terjadinya korupsi di pemerintah daerah tersebut semakin besar seiring dengan semakin banyaknya anggaran yang berpotensi untuk dikorupsi. Semakin besarnya persepsi korupsi masyarakat maka akan membuat nilai IPK pemerintah daerah semakin kecil.

H7 : Ukuran pemerintah daerah mempunyai pengaruh negatif terhadap nilai IPK pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen yaitu nilai IPK pemerintah daerah. Dalam penelitian ini peneliti mengambil nilai IPK pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2010 yang dikeluarkan oleh *Transparency International Indonesia* dan diunduh dari situs resmi *Transparency International Indonesia* (www.ti.or.id). Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari tujuh variabel yaitu opini BPK, temuan atas sistem pengendalian intern, temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio efektivitas dan ukuran pemerintah daerah.

Opini BPK merupakan hasil pemeriksaan keuangan atas kewajaran laporan keuangan entitas pemerintah yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Peneliti menggunakan skala ordinal dalam penelitian ini dimana opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberi nilai 4, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberi nilai 3, opini Tidak Wajar (TW) diberi nilai 2 dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) diberi nilai 1. Peneliti menggunakan laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk melihat jumlah temuan permasalahan atas sistem pengendalian intern dan temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada tahun 2010 dari setiap sampel pemerintah daerah dalam penelitian ini untuk mengukur pengaruh temuan atas sistem pengendalian intern serta pengaruh temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap nilai IPK pemerintah daerah.

Abdul Halim (2012) menjelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Rasio kemandirian dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pemerintah Pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai selama beberapa periode (Abdul Halim, 2012). Rasio pertumbuhan dalam penelitian ini diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan asli daerah tahun ini dengan realisasi pendapatan asli daerah tahun sebelumnya. Rumus dalam menghitung rasio pertumbuhan yaitu:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}_t - \text{Pendapatan Asli Daerah}_{t-1}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}_{t-1}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dengan membandingkan anggaran pendapatan asli daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah. Rasio efektivitas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas dalam pengelolaan pendapatan asli daerah yaitu:

1. Sangat efektif (>100%)
2. Efektif (>90% – 100%)
3. Cukup efektif (>80% – 90%)
4. Kurang efektif (>60% – 80%)
5. Tidak efektif (\leq 60%)

Ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini berdasarkan nilai total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut yang terdapat dalam neraca laporan keuangan pemerintah daerah.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia pada tahun 2010 yang berjumlah 530 pemerintah daerah yang terdiri atas 33 pemerintah provinsi, 399 pemerintah kabupaten dan 98 pemerintah kota (*indonesiadata.co.id*). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria pemilihan sampel. Kriteria pemilihan sampel yang ditentukan oleh peneliti yaitu pemerintah daerah yang memiliki nilai indeks persepsi korupsi dan mempunyai data pendukung yang lengkap. Sampel yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 46 pemerintah daerah di Indonesia.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam skala numerik (angka). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data-data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan indeks persepsi korupsi tahun 2010 yang dikeluarkan oleh *Transparency International Indonesia* dan diunduh dari situs resmi *Transparency International Indonesia* (*www.ti.or.id*) serta Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah selama tahun 2009-2010 yang diperoleh dari Pusat Informasi dan Komunikasi BPK di kantor pusat BPK.

Metode Analisis

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis yang meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis korelasi. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$IPK = a_0 + a_1(OPINI) + a_2(T_SPI) + a_3(TK) + a_4(RKM) + a_5(RP) + a_6(RE) + a_7(UP) + \epsilon$$

Keterangan:

IPK = Nilai IPK pemerintah daerah

OPINI = Opini audit BPK

T_SPI = Temuan atas sistem pengendalian intern

TK = Temuan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan

RKM = Rasio kemandirian

RP = Rasio pertumbuhan

RE = Rasio efektivitas

UP = Ukuran pemerintah daerah

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah pemerintah daerah yang memiliki nilai indeks persepsi korupsi pada tahun 2010. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia pada tahun 2010 yang berjumlah 530 pemerintah daerah yang terdiri atas 33 pemerintah provinsi, 399 pemerintah kabupaten dan 98 pemerintah kota (*indonesiadata.co.id*).

Sampel yang diambil pada penelitian ini berjumlah 46 pemerintah daerah. Pengambilan sampel pada penelitian ini didasarkan pada beberapa kriteria yaitu pemerintah daerah yang memiliki nilai indeks persepsi korupsi pada tahun 2010 serta memiliki data pendukung yang lengkap (laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2009 dan 2010). Rincian pengambilan sampel pemerintah daerah sebagai objek penelitian dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Pengambilan Sampel Penelitian

| URAIAN | JUMLAH |
|---|-----------|
| Populasi: Pemerintah Daerah di Indonesia tahun 2010 | 530 |
| Sampel awal: Pemerintah daerah yang memiliki nilai indeks persepsi korupsi tahun 2010 | 49 |
| Dikurangi: Pemerintah daerah yang tidak memiliki data pendukung yang lengkap (laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2010) | (3) |
| Total sampel penelitian | 46 |

Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu OPINI, T_SPI, TK, RKM, RP, RE, UP serta IPK. Hasil dari pengujian statistik terhadap variabel-variabel tersebut dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

| Variabel | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|----------|----|---------|---------|---------|----------------|
| OPINI | 46 | 1,00 | 4,00 | 2,8261 | 0,64306 |
| T_SPI | 46 | 2,00 | 34,00 | 9,0870 | 5,28237 |
| TK | 46 | 1,00 | 30,00 | 11,5217 | 6,40395 |
| RKM | 46 | 0,03 | 0,75 | 0,1676 | 0,14521 |
| RP | 46 | -0,11 | 68,97 | 1,6033 | 10,15448 |
| RE | 46 | 0,57 | 1,27 | 0,9491 | 0,16759 |
| UP | 46 | 10,66 | 14,60 | 12,3491 | 0,57612 |
| IPK | 46 | 3,61 | 6,71 | 4,9135 | 0,69471 |

Sumber: Data yang diolah, (2016)

Keterangan:

OPINI = Opini audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2010.

T_SPI = Jumlah temuan atas sistem pengendalian intern pemerintah daerah tahun 2010.

TK = Jumlah temuan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan pemerintah daerah tahun 2010.

RKM = Rasio kemandirian yang dihitung berdasarkan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah transfer pemerintah pusat dan pinjaman.

RP = Rasio pertumbuhan yang dihitung berdasarkan pendapatan asli daerah tahun 2010 dikurangi dengan pendapatan asli daerah tahun 2009 kemudian hasil pengurangan tersebut dibagi dengan pendapatan asli daerah tahun 2009.

RE = Rasio efektivitas yang dihitung berdasarkan realisasi pendapatan asli daerah dibagi dengan anggaran pendapatan asli daerah.

UP = Ukuran pemerintah daerah berdasarkan log dari total nilai aset pemerintah daerah.

IPK = Nilai IPK pemerintah daerah tahun 2010

Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan uji analisis regresi berganda. Uji analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas (OPINI, T_SPI, TK, RKM, RP, RE, UP) terhadap variabel terikat (IPK). Uji analisis regresi berganda terkait pengujian pengaruh variabel-variabel dalam penelitian ini didasarkan pada analisis koefisien determinasi, analisis uji statistik F dan analisis uji statistik t. Hasil Uji analisis regresi berganda pada penelitian ini ditunjukkan dalam tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

| Koefisien Regresi | Uji F | | Uji t | | | |
|-------------------|-------|-------|------------|--------|--------|-------|
| R Square | F | Sig. | Variabel | B | t | Sig. |
| 0,555 | 6,782 | 0,000 | (Constant) | 9,141 | 4,459 | 0,000 |
| | | | OPINI | -0,126 | -1,004 | 0,322 |
| | | | T_SPI | 0,025 | 1,417 | 0,165 |
| | | | TK | -0,041 | -3,116 | 0,003 |
| | | | RKM | 2,176 | 3,869 | 0,000 |
| | | | RP | -0,011 | -1,191 | 0,241 |
| | | | RE | 1,185 | 2,410 | 0,021 |
| | | | UP | -0,413 | -2,441 | 0,019 |

Sumber: Data yang diolah, (2016)

Koefisien determinasi pada regresi berganda menunjukkan kemampuan dari semua variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya. Koefisien determinasi dilihat dengan menggunakan nilai R Square dimana nilai R Square berkisar antara 0 sampai 1. Nilai R Square = 0 mempunyai arti bahwa variabel bebas tidak dapat menjelaskan sepenuhnya varians dari variabel terikatnya, sedangkan apabila nilai R Square = 1 mempunyai arti bahwa variabel bebas dapat menjelaskan sepenuhnya varians dari variabel terikatnya.

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi pada tabel 3, nilai R Square dalam model regresi penelitian ini sebesar 0,555. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel OPINI, T_SPI, TK, RKM, RP, RE dan UP dalam menjelaskan varians variabel IPK sebesar 55,5% sedangkan 44,5% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel bebas lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi model regresi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$) serta nilai F hitung dan F tabel. Variabel-variabel bebas dapat disebut berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya apabila nilai signifikansi model regresinya lebih kecil dari 0,05 dan memiliki nilai F hitung yang lebih besar dari nilai F tabel.

Berdasarkan hasil uji statistik F pada tabel 3, nilai signifikansi dari model regresi dalam penelitian ini bernilai 0,000 dengan nilai F hitung sebesar 6,782. Nilai signifikansi pada model regresi penelitian ini bernilai lebih kecil dari 0,05 serta nilai F hitung sebesar 6,782 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,262 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel OPINI, T_SPI, TK, RKM, RP, RE dan UP secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel IPK.

Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini adalah opini BPK mempunyai pengaruh positif terhadap nilai IPK pemerintah daerah. Berdasarkan hasil uji regresi berganda pada tabel 3 terlihat bahwa variabel OPINI memiliki nilai B sebesar -0,144 serta memiliki nilai signifikansi sebesar 0,277 yang berarti tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel IPK. Pemerintah daerah yang memiliki opini wajar tanpa pengecualian belum tentu mendapatkan nilai IPK yang baik, bahkan pemerintah daerah yang memiliki opini tidak wajar maupun tidak memberikan pendapat dapat memiliki nilai IPK yang tinggi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa **hipotesis pertama (H1) ditolak**.

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini adalah temuan atas sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh negatif terhadap nilai IPK pemerintah daerah. Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa variabel T_SPI memiliki nilai B sebesar 0,025 serta memiliki nilai signifikansi sebesar 0,165 yang berarti tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel IPK. Temuan atas sistem pengendalian intern yang berjumlah sedikit dalam suatu pemerintah daerah tidak memastikan pemerintah daerah tersebut mendapatkan nilai IPK yang baik, bahkan pemerintah daerah yang memiliki jumlah temuan atas sistem pengendalian intern dalam jumlah banyak dapat memiliki nilai IPK yang tinggi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa **hipotesis kedua (H2) ditolak**.

Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini adalah temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mempunyai pengaruh negatif terhadap nilai IPK pemerintah daerah. Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa variabel TK memiliki nilai B sebesar -0,041 yang berarti mempunyai pengaruh negatif serta memiliki nilai signifikansi sebesar 0,003 yang berarti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel IPK. Pemerintah daerah yang memiliki temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam jumlah sedikit akan mendapatkan nilai IPK yang baik dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memiliki jumlah temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih banyak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa **hipotesis ketiga (H3) diterima**.

Hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian mempunyai pengaruh positif terhadap nilai IPK pemerintah daerah. Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa variabel RKM memiliki nilai B sebesar 2,176 yang berarti mempunyai pengaruh positif serta memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel IPK. Nilai IPK suatu pemerintah daerah akan bernilai lebih tinggi apabila rasio kemandirian pemerintah daerah tersebut bernilai besar begitu juga sebaliknya nilai IPK suatu pemerintah daerah akan bernilai lebih rendah apabila rasio kemandirian pemerintah daerah tersebut bernilai kecil. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa **hipotesis keempat (H4) diterima**.

Hipotesis kelima (H5) dalam penelitian ini adalah rasio pertumbuhan mempunyai pengaruh positif terhadap nilai IPK pemerintah daerah. Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa variabel RP memiliki nilai B sebesar -0,011 serta memiliki nilai signifikansi sebesar 0,241 yang berarti tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel IPK. Pemerintah daerah yang memiliki rasio pertumbuhan bernilai besar belum tentu mendapatkan nilai IPK yang baik dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memiliki rasio pertumbuhan bernilai kecil. Hal ini terlihat dari peringkat nilai IPK dimana peringkat ketiga dalam nilai IPK mempunyai rasio pertumbuhan yang bernilai negatif sedangkan pemerintah daerah yang mempunyai peringkat lebih rendah mempunyai rasio pertumbuhan yang bernilai positif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa **hipotesis kelima (H5) ditolak**.

Hipotesis keenam (H6) dalam penelitian ini adalah rasio efektivitas mempunyai pengaruh positif terhadap nilai IPK pemerintah daerah. Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa variabel RE memiliki nilai B sebesar 1,185 yang berarti mempunyai pengaruh positif serta memiliki nilai signifikansi sebesar 0,021 yang berarti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel IPK. Nilai IPK suatu pemerintah daerah akan bernilai lebih tinggi apabila rasio efektivitas pemerintah daerah tersebut bernilai besar begitu juga sebaliknya nilai IPK suatu pemerintah daerah akan bernilai lebih rendah apabila rasio efektivitas pemerintah daerah tersebut bernilai kecil. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa **hipotesis keenam (H6) diterima**.

Hipotesis ketujuh (H7) dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah mempunyai pengaruh negatif terhadap nilai IPK pemerintah daerah. Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa variabel UP memiliki nilai B sebesar -0,413 yang berarti mempunyai pengaruh negatif serta memiliki nilai signifikansi sebesar 0,019 yang berarti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel IPK. Masyarakat mempunyai persepsi bahwa semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah maka semakin besar tingkat korupsi yang terjadi di pemerintah daerah tersebut yang berimbas pada semakin kecilnya nilai IPK pemerintah daerah tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa **hipotesis ketujuh (H7) diterima**.

Interpretasi Hasil

Pengaruh Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Nilai Indeks Persepsi Korupsi Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian ini, tidak semua hasil pemeriksaan BPK mempunyai pengaruh terhadap nilai indeks persepsi korupsi. Diantara opini, temuan atas sistem pengendalian intern dan temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan hanya temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mempunyai pengaruh terhadap nilai indeks persepsi korupsi pemerintah daerah.

Hasil penelitian terkait pengaruh hasil pemeriksaan BPK terhadap nilai indeks persepsi korupsi pemerintah daerah menunjukkan bahwa variabel OPINI tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai IPK pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian dari Wahyu Setiawan (2012) serta hasil penelitian dari Suchyo Heriningsih dan Marita (2013) yang membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara opini BPK dengan persepsi korupsi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki opini wajar (Wajar Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualian) tidak selalu mendapatkan nilai IPK yang tinggi bahkan dapat memperoleh nilai IPK yang sangat rendah. Selain itu, pemerintah daerah yang memiliki opini selain wajar (Tidak Wajar dan Tidak Memberi Pendapat) tidak selalu mendapatkan nilai IPK yang rendah.

Variabel T_SPI tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai IPK pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian dari Masyitoh,dkk (2012) serta hasil penelitian dari Wahyu Setiawan (2012) yang membuktikan bahwa temuan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap persepsi korupsi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah temuan atas sistem pengendalian intern pemerintah daerah tidak dapat memberikan kepastian bahwa nilai IPK pemerintah daerah tersebut bernilai kecil, bahkan pemerintah daerah yang memiliki temuan atas sistem pengendalian intern dalam jumlah besar dapat memiliki nilai IPK yang tinggi.

Variabel TK mempunyai pengaruh negatif terhadap nilai IPK pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian dari Masyitoh, dkk (2012) yang mengemukakan bahwa temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mempunyai pengaruh positif terhadap persepsi korupsi pemerintah daerah yang berarti mempunyai pengaruh negatif terhadap nilai IPK pemerintah daerah. Hal ini mempunyai arti bahwa semakin banyak jumlah temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan suatu pemerintah daerah maka nilai indeks persepsi korupsi pemerintah daerah tersebut akan bernilai semakin kecil. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Setiawan (2012) yang mengungkapkan bahwa temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan terkait teori agensi yang diungkapkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yaitu *moral hazard* dan *adverse selection*, temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat menjadi penyebab timbulnya permasalahan *moral hazard* antara masyarakat sebagai prinsipal dengan pemerintah sebagai agen. *Moral hazard* timbul karena agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja, dalam hal ini pemerintah sebagai agen tidak melaksanakan hal-hal yang sudah disepakati bersama dengan masyarakat yaitu undang-undang. Hal ini mempunyai dampak dalam kenaikan tingkat persepsi korupsi pemerintah daerah di mata masyarakat.

Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Nilai Indeks Persepsi Korupsi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian terkait pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap nilai indeks persepsi korupsi pemerintah daerah menunjukkan bahwa tidak semua rasio keuangan yang mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah mempunyai pengaruh terhadap nilai indeks persepsi korupsi. Diantara rasio kemandirian, rasio pertumbuhan dan rasio efektivitas hanya rasio kemandirian dan rasio efektivitas yang mempunyai pengaruh terhadap nilai indeks persepsi korupsi pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel RKM memiliki pengaruh positif terhadap nilai IPK pemerintah daerah. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian dari Sucahyo Heriningsih dan Marita (2013) yang mengungkapkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio kemandirian pemerintah daerah dengan persepsi korupsi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki rasio kemandirian yang lebih baik akan mendapatkan nilai IPK yang lebih tinggi.

Variabel RP memiliki tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai IPK pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian dari Sucahyo Heriningsih dan Marita (2013) yang mengungkapkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio pertumbuhan pemerintah daerah dengan persepsi korupsi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki rasio pertumbuhan yang lebih baik tidak selalu mendapatkan nilai IPK yang lebih tinggi. Selain itu, variabel RE memiliki pengaruh positif terhadap nilai IPK pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki rasio efektivitas yang lebih baik akan mendapatkan nilai IPK yang lebih tinggi.

Menurut Mardiasmo (2009), untuk menciptakan kondisi yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah maka diperlukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio kemandirian yang mengukur tingkat kemandirian pemerintah daerah, rasio pertumbuhan yang mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah dari satu periode ke periode berikutnya dan rasio efektivitas yang mengukur tingkat efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009) tersebut, hasil perhitungan kinerja keuangan pemerintah daerah yang dihitung melalui rasio-rasio keuangan dapat dijadikan acuan bagi masyarakat luas dalam menilai pengelolaan keuangan suatu pemerintah daerah. Masyarakat mempunyai persepsi bahwa semakin baik kinerja keuangan suatu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya maka semakin kecil tingkat korupsi yang terjadi di pemerintah daerah tersebut.

Widodo (2001) mengungkapkan bahwa masyarakat merupakan salah satu pihak yang berkepentingan terhadap hasil analisis rasio keuangan. Hasil analisis rasio keuangan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi. Hal ini menunjukkan bahwa apabila suatu pemerintah daerah memiliki rasio keuangan yang buruk maka akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi seiring dengan meningkatnya tingkat persepsi korupsi masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Nilai Indeks Persepsi Korupsi Pemerintah Daerah

Peneliti beranggapan bahwa masyarakat mempunyai persepsi bahwa semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah maka semakin besar tingkat korupsi yang terjadi di pemerintah daerah tersebut. Hal ini didasari pola pikir semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah maka peluang untuk terjadinya korupsi di pemerintah daerah tersebut semakin besar seiring dengan semakin banyaknya anggaran yang berpotensi untuk dikorupsi.

Hasil penelitian terkait pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap nilai indeks persepsi korupsi pemerintah daerah menunjukkan bahwa variabel UP memiliki pengaruh negatif terhadap nilai IPK pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut mendukung anggapan peneliti mengenai persepsi korupsi masyarakat terkait dengan ukuran pemerintah daerah yaitu semakin besar ukuran pemerintah daerah maka tingkat korupsi yang dapat terjadi di pemerintah daerah tersebut akan semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat persepsi korupsi yang lebih tinggi pada

pemerintah daerah yang memiliki ukuran yang lebih besar sehingga pemerintah daerah tersebut mendapatkan nilai IPK yang lebih kecil.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hasil pemeriksaan BPK, kinerja keuangan pemerintah daerah dan ukuran pemerintah daerah terhadap nilai indeks persepsi korupsi pemerintah daerah. Variabel-variabel dalam penelitian ini antara lain hasil pemeriksaan BPK yang terdiri atas opini BPK, temuan atas pengendalian intern dan temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Kinerja keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas rasio kemandirian, rasio pertumbuhan dan rasio efektivitas serta ukuran pemerintah daerah yang didasari atas jumlah total aset pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil uji regresi berganda terhadap variabel-variabel tersebut maka diperoleh beberapa hasil. *Pertama*, tidak seluruh hasil pemeriksaan BPK mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai indeks persepsi korupsi. Temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan satu-satunya variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai indeks persepsi korupsi. Temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mempunyai pengaruh negatif terhadap nilai indeks persepsi korupsi pemerintah daerah yang berarti bahwa semakin banyak jumlah temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan suatu pemerintah daerah maka nilai indeks persepsi korupsi pemerintah daerah tersebut akan bernilai semakin kecil. *Kedua*, tidak seluruh kinerja keuangan pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai indeks persepsi korupsi. Variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai indeks persepsi korupsi hanya rasio kemandirian dan rasio efektivitas. Rasio kemandirian mempunyai pengaruh positif terhadap nilai indeks persepsi korupsi pemerintah daerah. Hal ini mempunyai arti bahwa semakin besar nilai rasio kemandirian suatu pemerintah daerah maka nilai indeks persepsi korupsi pemerintah daerah tersebut akan bernilai semakin besar. Sejalan dengan rasio kemandirian, rasio pertumbuhan mempunyai pengaruh positif terhadap nilai indeks persepsi korupsi pemerintah daerah yang berarti bahwa semakin besar nilai rasio efektivitas suatu pemerintah daerah maka nilai indeks persepsi korupsi pemerintah daerah tersebut akan bernilai semakin besar. *Ketiga*, ukuran pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai indeks persepsi korupsi. Ukuran pemerintah daerah mempunyai pengaruh negatif terhadap nilai indeks persepsi korupsi pemerintah daerah yang berarti bahwa semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah maka nilai indeks persepsi korupsi pemerintah daerah tersebut akan bernilai semakin kecil.

Terdapat beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian ini. *Pertama*, belum ada penelitian terdahulu yang melakukan penelitian terkait pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap nilai indeks persepsi korupsi sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memberikan kepastian atas hasil penelitian. *Kedua*, nilai indeks korupsi pemerintah daerah dalam penelitian ini masih menggunakan data yang belum *up to date* dengan kondisi saat ini yaitu masih menggunakan data tahun 2010 karena data yang *up to date* tidak tersedia. Hal ini dapat menyebabkan adanya perbedaan dalam indikator penilaian persepsi korupsi antara tahun 2010 dengan kondisi saat ini akibat adanya perubahan serta perkembangan peraturan-peraturan terkait korupsi. *Ketiga*, peneliti hanya menggunakan tiga rasio keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah (rasio kemandirian, rasio pertumbuhan dan rasio efektivitas) serta hanya menggunakan jumlah total aset pemerintah daerah dalam mengukur ukuran pemerintah daerah. *Keempat*, pemerintah daerah yang memiliki nilai indeks persepsi korupsi masih sangat sedikit (49) jika dibandingkan dengan populasi pemerintah daerah di Indonesia (530) sehingga hasil penelitian ini belum dapat mewakili persepsi korupsi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan, serta keterbatasan dari penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran antara lain peneliti selanjutnya dapat menggunakan data-data yang lebih *up to date* agar lebih mencerminkan kondisi pada saat dilakukannya penelitian dan menambahkan rasio-rasio keuangan lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini dalam mengukur kinerja

keuangan pemerintah daerah seperti misalnya rasio efisiensi, rasio aktivitas dan lain lain. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menambahkan faktor-faktor lain dalam menilai ukuran pemerintah daerah seperti luas wilayah, jumlah penduduk dan lain lain serta menambahkan faktor-faktor politik dalam penelitian yang akan datang

REFERENSI

- Anwar, Syamsul. 2006. Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP)
- Arifah, Dista Amalia. 2012. Praktek Teori Agensi pada Entitas Publik dan Non Publik. Prestasi Vol.9 No. 1 – Juni 2012.
- Azhar, Muhammad. 2003. Pendidikan Antikorupsi, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi. Yogyakarta: LP3 UMY.
- Dwiputrianti, S. 2008. Efektivitas laporan hasil temuan pemeriksaan dalam mewujudkan reformasi transparansi fiskal dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi, vol. V, no. 4.
- Eisenhardt, Kathleem. M. 1989. Agency Theory: An Assesment and Review. Academy of management Review.
- Ghozali, Imam. 2006. Structural Equation Modeling: Metode Alternatif dengan *Partial Least Square* (PLS). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gupta, S., Davoodi H., and Alonso-Terme R. 2002. Does corruption effect income inequality and poverty? Economics of Governance, vol. 3, p. 23-45.
- Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2007. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartanti, Evi, 2005. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Heriningsih, Suchahyo. 2015. Analisis Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Tingkat Korupsi Dianalisis dari Opini Auditor. University Research Colloquium 2015.
- Heriningsih, Suchahyo dan Marita. 2013. Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa). Buletin Ekonomi Vol. 11, No. 1, April 2013.
- Jensen, Michael C dan William H. Meckling. 1976. Theory of the Firm : Manajerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3 (1976) 305-360. North-Holland Publish Company.
- Kaufman, D., Kraay, A., and Mastruzzi, M. 2006. Measuring corruption: Myths and realities. The World Bank.
- Kinney, W. R., and McDaniel, L. S. 1989. Characteristics of firms correcting previously reported quarterly earnings. Journal of Accounting and Economics, vol. 11, pp. 71-93.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi sektor publik. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Masyitoh, Rizki Diyah, Ratna Wardhani, dan Dyah Setyaningrum. 2012. Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010. Medan: Simposium Nasional Akuntansi.
- Nasir, Ridwan. 2006. Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer. Jakarta: IAIN Press & LKiS

- Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 2006. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 2004. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 2001. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Perubahan Ketiga. Sekretariat Negara. Jakarta.
- S.H., Alatas.1986. Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer. Jakarta: LP3ES.
- Scott, William R. 1997. Financial Accounting Theory, International Edition, New Jersey : Prentice-Hall, Inc.
- Sekaran, U. 2011. Research Methods for Business: A Skill Building Approach 4th Ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Wahyu. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap tingkat korupsi Pemerintah daerah di Indonesia. Skripsi, Undip.
- Simanjuntak, F., Digdowiseiso, K., dan Saputro, P. A. 2010. Mengukur korupsi di Indonesia. *Transparency International Indonesia*. 2010. Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2010. www.ti.or.id.
- Pramono, Joko. 2014. Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti*, Vol.7 No.13, Juli 2014.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wibowo, A. dan Rossieta, H. 2009. Faktor-Faktor Determinasi Kualitas Audit-Suatu Studi dengan Pendekatan Earnings Surprise Benchmark.
- Widodo. 2001. Analisa Rasio Keuangan pada APBD Boyolali, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Yuda, H. 2010. Korupsi dan industrialisasi pilkada. www.antikorupsi.org
- <http://bpk.go.id>
- <http://kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1601-jumlah-korupsi-meningkat-dua-kali-lipat-pada-2013>
- <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2016/01/27/corruption-perceptionss-index-2015>
- <http://www.ti.or.id>
- <http://www.voaindonesia.com/content/icw-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-dalam-3-tahun-terakhir-meningkat/1847983.html>
- <http://indonesiadata.co.id/main/index.php/jumlah-kabkota>